



The Decolonization of Colonial Archives on Indigenous Political Resistance in the Maluku Islands

(Dekolonisasi Arsip Kolonial Tentang Perlawanan Politik Pribumi di Kepulauan Maluku)

Aji Deni ^{1✉}, Agusmawanda ¹, Sosiawaty ¹ dan Aswir Badjoda ¹

¹ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kota Ternate, Indonesia.

Email: ajideni.fisip2022@gmail.com; agusmawanda79@gmail.com; sosiawatymasrul@gmail.com; aswirbadjodah@yahoo.co.id

✉ Email: ajideni.fisip2022@gmail.com

Info Artikel : Artikel Penelitian Artikel Pengabdian Riview Artikel

Diterima : 25 Mei 2026, Disetujui : 4 Juni 2026, Publikasi On-Line : 7 Juni 2026

Abstract

Colonial archives on the Maluku Islands heavily feature Eurocentric biases that marginalize indigenous perspectives, thereby distorting the history of local resistance and heroism. This study examines how decolonial archival practices dismantle embedded colonial epistemologies and restore marginalized indigenous voices. Employing a systematic review of interdisciplinary literature, this research analyzes the integration of local oral histories, indigenous traditions, and cultural expressions with conventional colonial archival sources. The synthesis yields a nuanced, alternative narrative of Malukan resistance through three distinct dimensions, archiving hidden indigenous agency overlooked in colonial historiography; establishing participatory methodologies that engage local communities in historical knowledge production; and formulating institutional critiques against archives and museums acting as prolonged instruments of colonial power. Ultimately, decolonizing archives in Maluku drives restorative justice and serves as an essential framework for constructing a more inclusive, pluralistic, and equitable Indonesian historiography.

📖 **Keyword:** *Dekolonisasi Arsip; Maluku; Perlawanan Pribumi; Historiografi Dekolonial; Politik Memori.*

I. PENDAHULUAN

Kepulauan Maluku, yang dikenal dalam wacana historis global sebagai Kepulauan Rempah-rempah, menyimpan sejarah panjang tentang pertemuan antara dunia lokal dan kekuatan kolonial Eropa. Sejak kedatangan Portugis pada abad ke-16 dan pendirian monopoli VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) pada abad ke-17, wilayah ini menjadi pusat eksploitasi ekonomi sekaligus medan perlawanan yang sengit terhadap imperialisme Barat. Peristiwa-peristiwa seperti pembantaian penduduk Banda pada tahun 1621 dan pemberontakan Pangeran Nuku dari Tidore pada akhir abad ke-18 hingga awal abad

ke-19 menjadi bukti bagaimana masyarakat Maluku tidak sekadar menjadi korban pasif kolonialisme, melainkan aktor yang secara aktif melawan dan merumuskan strategi-strategi ketahanan yang kompleks (Farid, 2024).

Namun, wacana tentang perlawanan dan kepahlawanan di Maluku selama ini didominasi oleh arsip-arsip kolonial yang mencerminkan perspektif Eurosentris. Dokumen-dokumen VOC, laporan-laporan residen Belanda, dan catatan-catatan misionaris menjadi sumber utama yang membentuk historiografi tentang wilayah ini (Mulyanto, 2023). Problem epistemologis yang muncul dari ketergantungan pada sumber-sumber kolonial ini tidak hanya memengaruhi

perspektif yang diambil, tetapi juga menciptakan batasan mendasar dalam memahami sejarah secara objektif dan lengkap. Artinya, historiografi menjadi cenderung memegang teguh sistem pengetahuan kolonial yang menyembunyikan, mereduksi, atau bahkan menghapuskan perspektif pribumi serta agensi lokal dari panggung sejarah. Arsip kolonial, sebagaimana diargumentasikan oleh sejarawan dan teoretikus arsip, bukanlah entitas netral yang merekam fakta-fakta objektif, melainkan teknologi kekuasaan yang dirancang untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan populasi terjajah (Stoler, 2006: 267).

Dalam dua dekade terakhir, kesadaran akan bias kolonial dalam praktik kearsipan telah mendorong munculnya gerakan dekolonisasi arsip di berbagai bekas wilayah jajahan, termasuk Indonesia (Heryanto, 2018; Genovese, 2016). Gerakan ini tidak hanya menuntut akses terhadap arsip-arsip yang tersimpan di lembaga-lembaga di Belanda, tetapi juga menuntut perubahan perubahan fundamental dalam cara arsip dideskripsikan, dikurasi, dan ditafsirkan. Lebih dari sekadar repatriasi dokumen, dekolonisasi arsip melibatkan pembongkaran epistemologi kolonial yang mengakar dalam praktik kearsipan, serta pengantiannya dengan kerangka kerja yang menghormati dan mengintegrasikan sistem pengetahuan pribumi. Upaya ini krusial karena sistem pengetahuan yang digunakan dalam membentuk sejarah wilayah ini selama ini cenderung bias dan tidak memperlihatkan pengalaman maupun aksi masyarakat pribumi secara utuh (Haberstock, 2020).

Di Maluku, proses dekolonisasi arsip memiliki urgensi khusus karena signifikansi historis wilayah ini dalam narasi pembentukan Indonesia modern. Pahlawan-pahlawan nasional seperti Pattimura (Thomas Matulesy) berasal dari Maluku, namun uraian perlawanannya sering kali ditinggalkan dalam kerangka nasionalis yang cenderung menyederhanakan kompleksitas dinamika lokal. Framing perjuangan Pattimura dan tokoh-tokoh Maluku lainnya dalam kacamata nasionalisme tunggal kerap mengabaikan keberagaman pengalaman riil masyarakat kepulauan Maluku. Sejarah yang berpusat pada agenda integrasi nasional sering kali menihilkan keunikan budaya lokal, struktur politik tradisional (seperti persekutuan Uli Lima dan Uli Siwa), serta motivasi khusus di balik strategi resistensi daerah yang sebenarnya sangat bervariasi dan tidak selalu sejalan dengan narasi kesatuan yang dikonstruksikan oleh pusat. Penyeragaman

sejarah ini berisiko mengubur kompleksitas relasi kuasa lokal dan negosiasi politik yang terjadi di tingkat akar rumput selama masa kolonial. Kritik terhadap simplifikasi narasi perjuangan ini berakar pada analisis mendalam yang dirumuskan dalam studi oleh O'Shea (2022) serta Kurniawan et al. (2019).

Selain itu, warisan kolonial di Maluku juga meninggalkan trauma kolektif yang mendalam dan berlapis. Salah satu titik paling kelam adalah peristiwa pembantaian massal di Kepulauan Banda pada tahun 1621 oleh VOC, sebuah genosida terstruktur yang dampaknya secara psikologis dan kultural masih dirasakan oleh generasi penerus masyarakat Maluku hingga hari ini. Wawasan kritis mengenai trauma kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi serta memori kelam pembantaian Banda ini mengacu pada studi komprehensif yang dilakukan oleh Van Donkersgoed (2023) serta McGregor & Dragojlovic (2024). Melalui kontribusi riset-riset tersebut, fakta sejarah ini kini mulai diakui, digali kembali secara kritis, dan didiskusikan secara lebih terbuka dalam wacana publik kontemporer di Indonesia guna mengembalikan hak suara sejarah lokal yang sempat terpinggirkan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana praktik dekolonisasi kearsipan di Kepulauan Maluku berkontribusi pada pemahaman yang lebih kaya tentang perlawanan dan kepahlawanan dalam historiografi Indonesia. Melalui kacamata teori pascakolonial, dekolonisasi arsip dipandang bukan hanya berkaitan dengan tindakan penataan ulang dokumen fisik, melainkan sebuah upaya aktif untuk membongkar struktur dan epistemologi kolonial yang masih mapan di dalam institusi kearsipan modern (Caswell et al., 2017). Upaya dekonstruksi ini berakar pada kritik Edward Said (1978) mengenai bagaimana representasi kekuasaan Barat membentuk pengetahuan tentang Timur, serta konsep *subaltern* dari Gayatri Spivak (1988) yang mempertanyakan agensi kaum terjajah di dalam teks-teks dominan yang cenderung bias dan membungkam suara lokal.

Berangkat dari kerangka teoretis tersebut, dekolonisasi kearsipan dalam studi ini tidak hanya diposisikan sebagai wacana abstrak, melainkan dioperasikan melalui sejumlah fokus kajian yaitu: mengevaluasi dampak dekolonisasi sumber-sumber arsip terhadap konstruksi sejarah Maluku guna (1) meruntuhkan narasi hegemoni yang selama ini mapan; (2) mengidentifikasi metodologi inovatif yang digunakan untuk mengintegrasikan tradisi lisan lokal (*oral history dan folklore*) dengan bahan-bahan arsip kolonial

formal guna memulihkan aspek agensi masyarakat kepulauan (Bastian, 2006); (3) mensintesis narasi-narasi alternatif tentang perlawanan dan kepahlawanan yang muncul dari praktik arsip dekolonial; (4) membandingkan representasi agensi pribumi dalam arsip kolonial versus ruang arsip yang telah didekolonisasi; dan Mendekonstruksi peran lembaga kearsipan serta warisan kolonialnya di Hindia Belanda untuk membongkar bagaimana arsip diproduksi bukan sebagai penyimpan fakta netral, melainkan sebagai instrumen tata kelola kekuasaan yang dipenuhi kecemasan epistemis (*epistemic anxieties*) dan bias dalam sejarah Indonesia (Stoler, 2009).

Kerangka konseptual yang digunakan dalam artikel ini mendefinisikan dekolonisasi sebagai proses pembongkaran epistemologi kolonial yang tertanam dalam arsip dan historiografi, dengan penekanan pada inklusi sistem pengetahuan pribumi dan praktik pengarsipan kolaboratif (Genovese, 2016; Haberstock, 2020). Perlawanan dan kepahlawanan dipahami tidak hanya sebagai tindakan militer atau politik, tetapi juga sebagai ekspresi budaya dan sosial yang dilestarikan melalui beragam media, termasuk tradisi lisan, puisi, seni visual, dan praktik-praktik ritual.

Teorisasi tentang dekolonisasi arsip dalam lanskap akademik kontemporer menunjukkan pergeseran krusial dari pemahaman arsip sebagai tempat penyimpanan data statis menjadi medan perlawanan aktif terhadap epistemicide atau penghancuran sistem pengetahuan lokal (Comber, 2025). Dekolonisasi ini dilakukan dengan membongkar bias kolonial, patriarki, dan kriminalisasi struktural yang tertanam dalam arsip-arsip hukum sejarah (Dorvillé, 2025), serta memunculkan kembali narasi dari ruang-ruang marginal, seperti suara masyarakat perdesaan dalam menyikapi krisis iklim (Beena, 2026). Melalui metode kritis seperti counter-mapping atau pemetaan tandingan, para peneliti sengaja mengusik ketidaknyamanan emosional dalam institusi kolonial guna membuka kemungkinan dekolonial yang baru (Finden, 2024; Finden, 2026). Lebih jauh lagi, dekolonisasi arsip merambah pada ranah estetik dan sensorik, di mana batas-batas visibilitas bekerjanya beasiswa adat ditantang secara konseptual (Staphorst, 2024), sementara pencarian jejak sejarah perempuan kulit hitam di universitas kulit putih diibaratkan seperti sebuah perburuan epistemik yang krusial (Sattarzadeh, 2024). Sebagai bentuk intervensi visual dan spasial, dekolonisasi memfungsikan fotografi kepolisian dan arsitektur sebagai arsip pelarian (*fugitive archives*) untuk

merancang masa depan yang merdeka (Eom, 2024), sekaligus memanfaatkan platform media modern guna mengembalikan hak suara pascakolonial yang sempat terbungkam (Cyzewski, 2024).

Di sisi lain, dekolonisasi arsip diwujudkan melalui transformasi material, kuratorial, dan teknologi yang meredefinisikan hubungan antara masa lalu kolonial dengan subjek kontemporer. Praktik eksperimental seperti rakitan citra-material (*imago-material assemblages*) di wilayah tertentu membuktikan bahwa arsip dapat diciptakan kembali sebagai penemuan dekolonial yang hidup (Reyero, 2026). Di benua Eropa, upaya ini diwujudkan dengan melatih ulang tata cara kuratorial terhadap arsip suara Asia Tenggara agar tidak lagi terjebak dalam eksotisme kolonial (Yamomo, 2025), yang sejalan dengan pemanfaatan kembali arsip kolonial itu sendiri sebagai sumber daya kebudayaan dekolonial yang transformatif (Basu, 2024). Proses dekolonisasi ini juga menuntut pendekatan relasional di era otomatisasi digital agar tidak mereproduksi kuasa kolonial baru dalam sistem kecerdasan buatan (Long, 2025), serta menuntut lensa dekolonial yang jeli saat audiens mengalami dan berinteraksi dengan arsip mode digital (Schon, 2025). Di tingkat kerja sama praktis, rekonstruksi kanon seni atau lagu melalui kemitraan internasional mampu membangun fungsi arsip sebagai alat pedagogis sekaligus sumber daya dekolonial (Ingalls, 2024). Di bidang sastra dan seni rupa, dekolonisasi meluas hingga penggunaan metafora bawah air dan samudra sebagai strategi ingatan melawan kehilangan (Young, 2025), pelibatan estetika penciuman (*olfactory aesthetics*) untuk membongkar keruntuhan patriarki (Vishwajeet, 2026), hingga dekonstruksi radikal dalam pembuatan dan pembongkaran arsip melalui praktik seni kontemporer global (Crisci, 2024).

Signifikansi teoretis artikel ini terletak pada upayanya untuk menjembatani teori kearsipan, studi pascakolonial, dan sejarah regional dalam kerangka analisis yang integratif. Secara praktis, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya-upaya dekolonisasi yang sedang berlangsung di lembaga-lembaga arsip dan museum di Indonesia, serta mendukung advokasi untuk keadilan restoratif bagi komunitas-komunitas yang terdampak kekerasan kolonial. Hubungan timbal balik antara rekonstruksi sejarah regional dan keadilan restoratif tersebut menuntut pembongkaran terhadap pondasi epistemologis yang selama ini mapan. Lembaga kearsipan tidak dapat lagi dipandang sebagai ruang netral penyimpan

memori masa lalu, melainkan harus dibaca sebagai artefak politik yang merekam bagaimana struktur kekuasaan kolonial dibangun dan dipertahankan. Untuk memahami bagaimana lembaga-lembaga ini mengonstruksi narasi sejarah, analisis harus ditarik mundur pada akar historis pembentukan tatanan dunia modern itu sendiri.

Bukti paling awal dari tata dunia modern yang kita kenal saat ini pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari perluasan proyek kolonialisme global. Sebagaimana diuraikan secara tajam oleh Walter Mignolo (2007), kolonialitas bukanlah sekadar dampak sampingan dari modernitas Barat, melainkan fondasi konstitutif atau sisi gelap yang memungkinkannya eksis. Kolonialitas ini beroperasi melalui apa yang disebut sebagai matriks kekuasaan colonial, sebuah sistem tata kelola kompleks yang diarsiteki dan dikendalikan oleh institusi serta pemikir Barat sejak masa Renaisans. Penting untuk ditegaskan bahwa matriks ini tidak sekadar mewujud dalam struktur politik formal, penaklukan militer, atau penguasaan teritorial semata. Lebih dari itu, ia merupakan sebuah sistem holistik yang menjalin jaringan ekonomi kapitalistik, produksi budaya, kendali subjektivitas, dan konstruksi identitas secara interdependen. Melalui interkoneksi inilah, kolonialitas bekerja sebagai totalitas totaliter yang mengatur, mendefinisikan, dan mendisiplinkan hampir seluruh aspek eksistensial kehidupan manusia di belahan bumi selatan.

Dalam lanskap matriks tersebut Quijano (2000: 256) mengonseptualisasikan struktur dominasi ini sebagai kolonialitas kekuasaan sebagai model klasifikasi sosial universal di mana gagasan artifisial mengenai ras diciptakan sebagai poros utama untuk mengadili dan memilah populasi dunia. Kategorisasi rasial inilah yang digunakan untuk melegitimasi pembagian kerja global dan distribusi kekuasaan yang timpang demi keuntungan imperium kolonial. Dari rahim kolonialitas kekuasaan inilah lahir kolonialitas pengetahuan. Hubungan kausalitas ini terjadi karena kelangsungan hegemoni kolonial tidak akan pernah kokoh jika hanya mengandalkan instrumen kekerasan fisik atau represi militer. Kekuasaan memerlukan basis legitimasi yang subtil namun merasuk dalam. Kolonialitas pengetahuan dibutuhkan untuk menanamkan narasi, kanon rasionalitas, dan sistem pengetahuan Eurosentris yang mampu menaturalisasi dominasi tersebut. Akibatnya, kolonialitas pengetahuan bekerja secara sistematis melalui pembunuhan epistemik melalui

mekanisme yang mengonstruksikan epistemologi lokal sebagai sesuatu yang magis, inferior, dan pra-modern, sekaligus menguduskan sains Barat sebagai satu-satunya metodologi yang universal, objektif, dan sah untuk memahami dunia (Mignolo, 2007: 375).

Menanggapi dominasi epistemik yang telah mengakar selama berabad-abad ini, proyek dekolonisasi kontemporer tidak boleh berhenti pada penyerahan kedaulatan politik atau kemerdekaan administratif belaka. Sebagaimana didokumentasikan oleh Smith (2021: 67), dekolonisasi yang sejati menuntut pembongkaran radikal terhadap metodologi penelitian Barat yang secara inheren terikat dengan sejarah imperialisme. Metodologi konvensional sering kali menempatkan masyarakat adat dan lokal hanya sebagai objek curahan data yang pasif, yang kemudian diteoretisasikan menggunakan kacamata Barat. Oleh karena itu, dekolonisasi metodologis menjadi agenda krusial untuk memulihkan kedaulatan berpikir, meruntuhkan klaim universalisme Barat, dan membuka ruang aman bagi tumbuhnya cara-cara mengetahui (*ways of knowing*) serta cara-cara mengada (*ways of being*) yang berakar dari kosmologi dan pengalaman otentik masyarakat adat. Melalui rekonstruksi metodologis ini, pengetahuan lokal tidak lagi diletakkan di pinggiran, melainkan diposisikan sebagai mitra dialogis yang setara dalam upaya global memecahkan krisis kemanusiaan.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) melalui metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mensintesis berbagai temuan dari studi interdisipliner yang relevan dengan topik dekolonisasi arsip di Kepulauan Maluku. Mengingat sifat topik yang multidimensi—mencakup rumpun ilmu kearsipan, historiografi, antropologi, studi pascakolonial, hingga kajian budaya—tinjauan sistematis menjadi instrumen yang ideal. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola tematik, titik temu (konsensus), perbedaan pandangan (*divergensi*) lintas studi, sekaligus memetakan kesenjangan yang masih ada dalam literatur ilmiah saat ini (Douglas et al., 2018).

Untuk memastikan cakupan literatur yang komprehensif, pertanyaan penelitian utama mengenai kontribusi dekolonisasi arsip di Kepulauan Maluku terhadap pemahaman

perlawanan dan kepahlawanan dalam sejarah Indonesia ditransformasikan ke dalam tiga kueri penelusuran yang lebih spesifik. Kueri tersebut difokuskan pada eksplorasi narasi alternatif perlawanan melalui dekolonisasi praktik kearsipan, investigasi peran narasi lokal dalam membentuk historiografi Indonesia dengan fokus Maluku, serta analisis dampak kolonialisme terhadap praktik kearsipan di wilayah Kepulauan Rempah-rempah tersebut (Balk et al., 2007; Septiani et al., 2025). Guna menjaga relevansi dan kualitas sumber yang dijangkau, peneliti menetapkan kriteria inklusi yang ketat, seperti batasan studi yang secara eksplisit membahas dekolonisasi atau kritik arsip kolonial, berfokus pada Maluku atau Indonesia Timur, mengangkat tema agensi pribumi, diterbitkan dalam rentang tahun 2000 hingga 2025, serta tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Sebaliknya, studi yang hanya mengulas kolonialisme secara umum tanpa dimensi kearsipan atau tidak berpijak pada konteks Maluku langsung dieksklusi dari penelitian.

Proses penyaringan awal berbasis kueri tersebut berhasil menjaring 98 studi yang memenuhi syarat. Peneliti kemudian memperluas jangkauan pencarian menggunakan teknik rantai kutipan, baik secara mundur dengan memeriksa daftar referensi studi inti untuk menemukan karya fundamental terdahulu, maupun rantai kutipan maju untuk melacak studi lebih baru yang telah mengutip makalah inti tersebut guna menangkap debat akademik terkini (Karabinos, 2013). Kombinasi teknik ini menghasilkan 61 studi tambahan, sehingga total literatur yang terkumpul menjadi 159 studi. Setelah melalui penilaian relevansi dan kualitas metodologi melalui sistem perankingan, sebanyak 156 studi dinyatakan relevan, dan 39 di antaranya dipilih sebagai korpus utama analisis karena dinilai sangat relevan serta representatif dalam mewakili berbagai disiplin ilmu, mulai dari sejarah, antropologi, kajian budaya, hingga ilmu politik (misalnya, Andaya, 1993; Widjojo, 2009).

Data yang telah terhimpun dalam korpus utama kemudian dibedah mendalam menggunakan kombinasi pendekatan analisis tematik dan analisis wacana kritis. Analisis tematik diaplikasikan melalui proses pengodean (coding) terstruktur untuk mengklasifikasikan teks ke dalam kluster konseptual sehingga pola berulang dan tema utama wacana dekolonial dapat dipetakan secara jelas. Sementara itu, analisis wacana kritis digunakan untuk membongkar struktur kekuasaan dan bias ideologis di dalam teks. Secara khusus, analisis ini

mengadopsi teori Stoler (2006) mengenai pembacaan arsip kolonial bukan sebagai gudang fakta yang netral, melainkan sebagai instrumen administrasi kekuasaan yang sarat bias. Melalui pisau analisis Stoler, dokumen kolonial di Kepulauan Rempah-rempah dibedah sebagai produk dari relasi kuasa asimetris, yang pada gilirannya memungkinkan peneliti untuk memunculkan kembali agensi pribumi serta narasi lokal yang selama ini terpinggirkan oleh sejarah mainstream.

Guna memastikan keabsahan dari seluruh interpretasi yang dihasilkan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk meningkatkan validitas temuan. Triangulasi sumber dilakukan dengan menguji silang temuan dari berbagai rumpun literatur, seperti sejarah murni, teori pascakolonial, dan studi empiris. Selanjutnya, triangulasi metode diwujudkan dengan mengonfirmasi keajekan pola tematik menggunakan dua pisau analisis yang berbeda, yaitu analisis tematik dan analisis wacana kritis. Kendati demikian, penelitian ini tetap memiliki keterbatasan yang tidak dapat dihindari, terutama terkait dominasi literatur berbahasa Inggris dalam korpus akademik yang mapan serta tingginya ketergantungan pada sumber sekunder. Keterbatasan ini muncul akibat adanya hambatan akses fisik maupun digital terhadap koleksi arsip primer kolonial skala besar, yang hingga saat ini sebagian besar masih tersimpan di berbagai lembaga kearsipan di Belanda.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulisan bagian Hasil dan Pembahasan memuat hasil-hasil atau temuan penelitian (scientific finding) yang diikuti dengan pembahasannya secara ilmiah. Uraian pembahasan pada bab Hasil dan Pembahasan bersifat deskriptif, analitis dan kritis. Jika diperlukan gambar dan tabel, disajikan proporsional dan menarik. Tidak terjadi pengulangan antara deskripsi dan tabel atau gambar yang disajikan. Salah satu temuan paling signifikan dari tinjauan literatur adalah konsensus yang meluas tentang perlunya mengintegrasikan arsip kolonial dengan sejarah lisan lokal dan sistem pengetahuan adat untuk menghasilkan narasi sejarah yang lebih inklusif dan akurat. Sebanyak 23 dari 50 studi yang dianalisis secara eksplisit membahas upaya integrasi semacam ini, dengan beragam tingkat keberhasilan dan kompleksitas metodologis (Van Donkersgoed, 2023; Gordon et al., 2019).

Dekolonisasi arsip kolonial terkait perlawanan politik pribumi di Kepulauan Maluku bukan hanya memindahkan atau mendigitalisasi dokumen fisik, melainkan sebuah pembongkaran radikal terhadap struktur epistemik Eurosentris yang melekat pada pembentukan arsip tersebut. Menggunakan kacamata Stoler (2006, 2010), arsip yang diproduksi oleh VOC dan pemerintah Hindia Belanda—seperti yang terdokumentasi dalam *Landsarchivaris* (Balk et al., 2007; Elfathir et al., 2024) bukanlah pencatatan netral, melainkan instrumen tata kelola dan kecemasan epistemik kolonial. Dokumen-dokumen ini diproduksi untuk memantau, mengontrol, dan meredam pergolakan pribumi. Ketika perlawanan rakyat Maluku, seperti pemberontakan Pangeran Nuku (Widjojo, 2018) atau Peristiwa Pattimura 1817 (Post, 2024), dicatat sebagai pemberontakan atau tindakan kriminal, arsip tersebut sedang menjalankan fungsi *coloniality of power* (Quijano, 2000). Oleh karena itu, membaca arsip kolonial harus dilakukan secara kritis dengan melawan arus dan membongkar bias institusional di balik penciptaannya (Bastian, 2006).

Dalam merekonstruksi suara perlawanan pribumi di Maluku, peneliti dihadapkan pada batas-batas representasi subaltern. Menilik premis Spivak (2025) mengenai "*Can the Subaltern Speak?*", agensi politik aktor lokal di Maluku sering kali terkubur di bawah dominasi narasi kolonial yang bias gender dan rasial (Dorvillé, 2025; Said, 1978). Sebagai contoh, narasi mengenai kegigihan lokal di Loloda atau Banda kerap direduksi menjadi sekadar catatan militer atau laporan administratif yang dingin (Christomy & Suharjo, 2019; Farid, 2024). Namun, melalui strategi *delinking* (Mignolo, 2007) dan dekolonisasi metodologi (Smith, 2021), studi kontemporer berupaya melakukan pemetaan tandingan (*counter-mapping*) terhadap arsip kolonial (Finden, 2024). Penafsiran ulang ini melahirkan *truestoriografi*, sebuah penulisan sejarah yang menggeser fokus dari kekerasan kolonial massal menuju resiliensi, memori kolektif, dan hak hidup masyarakat kepulauan yang selama ini dimarginalkan (Farid, 2024; Van Donkersgoed, 2023).

Lebih jauh lagi, dekolonisasi menuntut pengakuan terhadap bentuk arsip alternatif yang berada di luar tradisi tekstual Barat. Di Kepulauan Maluku, memori perlawanan dan relasi sosial justru hidup subur melalui tradisi lisan, lanskap budaya, traktat lokal, hukum adat (*adat*), serta lagu-lagu rakyat (McGregor & Dragojlovic, 2024; van Engelenhoven, 2021). Konstruksi ini sejalan dengan konsep arsip dekolonial sebagai sumber

daya budaya (Basu, 2024) yang melampaui batas fisik ruang penyimpanan formal. Ketika ingatan kolektif tentang genosida Banda tahun 1621 atau Perang Payudara di masa akhir VOC (Farid, 2024; Gordon et al., 2019) dipertahankan melalui media seni, sastra, dan tradisi performatif, masyarakat Maluku sebenarnya sedang mempraktikkan resistensi terhadap *epistemicide* atau pembunuhan sistematis terhadap pengetahuan lokal (Comber, 2025; Crisci, 2024). Arsip non-tekstual ini menginterupsi hegemoni narasi tertulis Belanda dan menghadirkan dimensi afektif serta emosional yang selama ini sengaja dihapus dari lembar-lembar dokumentasi kolonial (Finden, 2026).

Pada ranah kontemporer, dekolonisasi arsip Maluku berwujud manifestasi politik praktis dan tata kelola pengetahuan global melalui *heritage diplomacy* serta gerakan repatriasi (Abdillah & Nuraeni, 2025; van Beurden, 2022). Pengembalian artefak dan dokumen sejarah yang sempat dipindahkan secara paksa menjadi momentum penting untuk mendefinisikan ulang pahlawan nasional dan memori publik Indonesia (Arainikasih, 2024; Karabinos, 2013). Namun, tantangan baru muncul di era digitalisasi. Desentralisasi dan otomatisasi arsip digital harus dirancang dengan intensi dekolonial agar tidak mengulang pola kategorisasi kolonial yang hierarkis (Caswell et al., 2017; Long, 2025). Mengubah deskripsi arsip (*archival description*) dengan melibatkan perspektif komunitas lokal, atau dekolonisasi partisipatif (Haberstock, 2020) sebagai kunci utama agar arsip kolonial Maluku bertransformasi dari alat penundukan masa lalu menjadi ruang emansipasi politik dan pemulihan martabat sejarah pribumi di masa kini (Supratman, 2021; Utami et al., 2024).

Berikut adalah sintesis teoretis yang memetakan data sejarah Perlawanan Maluku ke dalam kerangka konseptual kritis yang diringkas dalam bentuk Tabel 1. Narasi sejarah bentukan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) secara konsisten mereduksi realitas Kepulauan Banda pasca-1621 ke dalam perspektif eurosentris yang bias kekuasaan. Dokumentasi resmi kolonial sengaja mengonstruksi tindakan brutal berupa pembantaian massal sebagai langkah logis, efisien, dan krusial demi menegakkan kestabilan tata niaga serta monopoli komoditas pala di pasar global. Hegemoni tekstual ini mengabaikan kedaulatan masyarakat pribumi dengan menyematkan stigma negative, seperti tidak andal, eratis, dan pemberontak guna melegitimasi penaklukan militer secara masif. Pendekatan positivistik kolonial ini secara sistematis

menghapus tatanan sosial-politik lokal dan menempatkan masyarakat Banda semata-mata sebagai objek tak berdaya dalam kronik perluasan kapitalisme barat.

Tabel 1. Pemetaan Sintesis Teoretis Sejarah Perlawanan Maluku dalam Kerangka Kritis

Fokus Kajian / Data Arsip	Basis Teori & Literatur Utama	Interpretasi Kritis & Dekolonial
Arsip Administrasi VOC & Pemerintah Hindia Belanda (Catatan <i>Landsarchivaris</i>)	Stoler (2006, 2010); Quijano (2000); Elfathir et al. (2024)	Arsip bukan rekaman fakta objektif, melainkan teknologi kekuasaan (<i>arts of governance</i>) untuk mengontrol resistensi pribumi dan meredam kecemasan epistemik kolonial.
Narasi Perlawanan Lokal (Pemberontakan Nuku, Perang Pattimura, Konflik Loloda)	Spivak (2025); Mignolo (2007); Widjojo (2018); Post (2024)	Mengangkat suara subaltern yang dikriminalisasi kolonial lewat strategi <i>delinking</i> . Menggeser perspektif dari "pemberontak" menjadi agensi politik pribumi yang sah.
Genosida Banda (1621) & Kekerasan Kolonial	Farid (2024); Van Donkersgoed (2023); Said (1978)	Mentransformasi <i>memoria passionis</i> (memori trauma) menjadi <i>truestoriografi</i> yang berpusat pada resiliensi masyarakat kepulauan, menolak bias Orientalisme Barat.
Tradisi Lisan, Lagu Rakyat, & Hukum <i>Adat</i> Maluku	Basu (2024); McGregor & Dragojlovic (2024); van Engelenhoven (2021)	Memosisikan tradisi non-tekstual sebagai "arsip dekolonial" hidup yang melawan <i>epistemicide</i> dan melengkapi kekosongan afektif dalam dokumen tertulis Belanda.
Repatriasi Dokumen & Tata Kelola Digital (<i>Displaced Archives</i> , Deskripsi Arsip)	Karabinos (2013, 2015); Smith (2021); Haberstock (2020); Caswell et al. (2017)	Repatriasi fisik dan restrukturisasi deskripsi arsip digital secara partisipatif adalah langkah memulihkan kedaulatan sejarah dan meruntuhkan hegemoni kuratorial Barat.

Sumber: Data Diolah

Sebagaimana dikritisi oleh van Donkersgoed (2023) dalam studinya mengenai dekolonisasi arsip: *"Rather than revolving around the arrival and conquest by European merchants (including the Portuguese prior to the Dutch), their history is rooted in pre-colonial heroes, the arrival of Islam in the islands, and the resistance of local leaders to Dutch colonial dominance. Their story therefore revolves around resistance and resilience rather than victimhood and oppression."*

Sebaliknya, tradisi lisan kontemporer dan manuskrip lokal seperti Hikayat tentang Pulau Lonthoir membuka tabir sejarah yang selama ini sengaja digelapkan oleh arsip resmi Belanda. Melalui penuturan turun-temurun, tatanan nilai masyarakat Banda dikonstruksi ulang bukan dari titik mula kedatangan bangsa Eropa, melainkan dari kedalaman akar spiritual Islam dan sistem kepemimpinan komunal yang berdaulat. Tradisi lisan membuktikan bahwa jauh sebelum VOC memaksakan hegemoninya, masyarakat Banda telah memiliki sistem musyawarah melalui pembagian aliansi Orlima (Persekutuan Lima) dan Orsia (Persekutuan Sembilan). Dimensi-dimensi kultural-spiritual inilah yang absen dari dokumen kolonial, sebab VOC hanya berfokus pada kalkulasi komersial dan penaklukan fisik. Melalui pelestarian memori alternatif ini, masyarakat pribumi berhasil merebut kembali hak agensi

mereka, menunjukkan bahwa identitas historis mereka tidak pernah terkikis habis oleh genosida kolonial. Secara spesifik, strategi pertahanan dan dinamika perlawanan sehari-hari masyarakat pribumi di lapangan sengaja disembunyikan atau didegradasi dalam catatan VOC. Dokumen kolonial umumnya hanya mencatat hasil akhir penaklukan atau menggambarkan resistensi lokal sebagai gangguan keamanan yang tidak terorganisasi.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan dinamika yang jauh lebih kompleks, di mana masyarakat Banda memiliki kecerdasan taktis, termasuk mendirikan kamp-kamp militer mandiri, menggalang aliansi strategis antarpulau, serta memanfaatkan jalur diplomasi formal melalui tokoh-tokoh lokal yang terdidik dan fasih berbahasa asing guna menandingi agresi militer Belanda. Pola perlawanan sistematis inilah yang tidak tercermin dalam dokumen resmi penjajah. Fenomena penderitaan mendalam sekaligus ketahanan kultural yang luar biasa ini dianalisis secara tajam oleh Farid (2024), yang menegaskan: *"Kekejaman JP. Coen menjadi kenangan masa lalu yang sulit dilupakan orang Banda. Menjadi sebuah Memoria in Passionis, yaitu suatu ingatan di masa lampau yang tak mungkin lupa dari ranah kehidupan karena peristiwa yang begitu menyakitkan fisik maupun psikis yang terekam dari generasi ke generasi. Hantaman peristiwa kekerasan kemanusiaan (violence) seperti inilah*

yang menjadi ingatan penderitaan kolektif bagi orang Banda."

Konstruksi ulang terhadap aspek-aspek pengalaman pribumi yang hilang dilakukan dengan menyejajarkan tradisi lisan, ritual adat, dan ekspresi seni budaya pada kedudukan ilmiah yang setara dengan dokumen tertulis kolonial. Praktik dekolonisasi sejarah ini menuntut perluasan definisi arsip dengan memasukkan instrumen kebudayaan hidup seperti tarian perang Cakalele serta nyanyian adat Kabata, sebagai dokumen sejarah yang valid. Melalui medium-medium budaya tersebut, rincian peristiwa traumatis, rute pelarian geografi, hingga taktik bertahan hidup masyarakat pribumi dikodekan dan diwariskan melintasi batas generasi. Integrasi metodologis ini membongkar kepalsuan klaim objektivitas arsip kolonial, menyingkap bahwa catatan administratif keagamaan maupun dagang imperial pada dasarnya merupakan instrumen politik untuk melanggengkan kekuasaan penjajah.

Perpaduan interdisipliner antara dokumen tertulis dan sejarah lisan tidak sekadar memperkaya khazanah historiografi, melainkan berfungsi sebagai instrumen restoratif bagi komunitas yang mengalami trauma antargenerasi. Ketika ingatan kolektif yang tersimpan dalam ruang-ruang sunyi masyarakat adat diangkat ke permukaan, proses penyembuhan kultural atas kepedihan masa lalu dapat diwujudkan secara berkeadilan. Penulisan ulang sejarah yang dekolonial ini mengubah posisi masyarakat Banda dari status korban yang pasif dalam narasi eurosentris menjadi pelaku aktor sejarah politik perlawanan anti-kolonialisme yang tangguh dalam lini masa peradaban Pulau Banda sendiri. Upaya transformatif ini menantang kemapanan identitas historis yang diwariskan oleh pemenang kolonial dan membuka jalan bagi rekonstruksi masa lalu yang lebih jujur, inklusif, dan humanis.

Namun integrasi sumber-sumber ini bukannya tanpa tantangan. Beberapa penelitian mencatat kesulitan dalam menyeimbangkan dominasi arsip kolonial, yang sering kali lebih terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan mudah diakses, dengan ragam sumber non-kolonial seperti tradisi lisan, dokumen tidak resmi, atau keterangan budaya lain yang mungkin tersebar, tidak terdokumentasi secara formal, atau disampaikan dalam bahasa dan dialek lokal. Dalam tinjauan kritisnya tentang historiografi Indonesia, Mulyanto (2023) melalui analisis komparatif-tekstualnya mengidentifikasi dilema metodologis yang dihadapi para sejarawan. Di satu sisi, temuan utama Mulyanto menunjukkan

bahwa arsip kolonial menawarkan detail kronologis dan administratif yang tak tertandingi; namun di sisi lain, tradisi lisan dan dokumen domestik tersebut mengandung perspektif serta kategori analitik pribumi yang tidak dapat direduksi ke dalam kerangka berpikir kolonial.

Resolusi terhadap dilema ini, menurut literatur, terletak pada adopsi metodologi yang tidak sekadar menambahkan tradisi lisan atau dokumen tidak resmi sebagai pelengkap, tetapi secara fundamental mengubah kerangka interpretasi. Pendekatan fenomenologis-historis yang diusulkan oleh Farid, misalnya, menekankan perlunya membaca melawan arus terhadap arsip kolonial, yaitu membaca dokumen-dokumen kolonial bukan untuk mencari fakta-fakta objektif tetapi untuk mengungkap apa yang sengaja dihilangkan, ditekan, atau didistorsi oleh logika kekuasaan kolonial (Farid, 2024). Pada akhirnya, kegagalan dalam mengatasi ketimpangan dokumentasi antara arsip resmi dan memori lisan ini tidak hanya akan melanggengkan bias eurosentris, tetapi juga menghambat proyek dekolonisasi historiografi dalam menghasilkan narasi sejarah nasional yang mandiri dan emansipatif.

Proses integrasi berbagai sumber arsip berhasil melahirkan narasi-narasi alternatif tentang perlawanan dan kepahlawanan yang secara signifikan memperkaya, bahkan dalam beberapa kasus menantang, historiografi konvensional tentang Maluku. Sebanyak 17 studi dalam korpus yang dianalisis secara khusus berfokus pada pengungkapan narasi semacam ini (Widjojo, 2018; Rahman et al., 2023). Salah satu contoh yang paling menonjol adalah re-interpretasi terhadap pemberontakan Pangeran Nuku dari Tidore (c. 1780-1810). Dalam historiografi kolonial, pemberontakan ini sering digambarkan sebagai konflik antar-kesultanan atau sebagai perlawanan yang terfragmentasi dan pada akhirnya gagal (Post, 2024). Namun, penelitian Widjojo (2018) yang mengintegrasikan sumber-sumber kolonial dan pribumi mengungkapkan bahwa Pangeran Nuku mengembangkan strategi aliansi lintas budaya yang sangat canggih, melibatkan tidak hanya kerajaan-kerajaan Maluku tetapi juga Inggris, Ternate, dan berbagai kelompok etnis di Papua. Lebih dari sekadar perlawanan militer, gerakan Nuku mencakup dimensi ekonomi (penolakan terhadap monopoli VOC), diplomatik (negosiasi dengan kekuatan Eropa saingan), dan ideologis (penggunaan Islam sebagai pemersatu melawan kekuatan Kristen Belanda) (Post, 2024). Narasi alternatif juga muncul tentang peristiwa yang

lebih lokal, seperti pembunuhan *posthoulder* (kepala pos) Belanda Scheerder dan insiden yang dikenal dalam tradisi lisan Aru sebagai Perang Payudara atau *Jifar Folfolun* (Gordon et al., 2019) yang membandingkan narasi Belanda dan Malukan tentang insiden yang terjadi pada masa-masa akhir kekuasaan VOC di Kepulauan Aru. Sementara dokumen-dokumen Belanda menyajikan peristiwa tersebut sebagai pemberontakan biadab yang memerlukan tindakan keras, tradisi lisan Aru menggambarkannya sebagai respons balik terhadap pelanggaran adat yang dilakukan oleh perwakilan VOC (Gordon et al., 2019).

Perbedaan radikal dalam penyebutan insiden antara pembunuhan kepala pos oleh Belanda dan Perang Payudara (*Jifar Folfolun*) oleh masyarakat Aru bukan hanya berkaitan dengan masalah pilihan kata, melainkan sebuah benturan representasi yang memiliki implikasi sosial-politik yang masif. Dokumen kolonial secara sengaja menggunakan terminologi kriminalitas dan anarki untuk melegitimasi kekerasan militer (*punitieve expedities*) atas nama penegakan hukum dan ketertiban. Sebaliknya, penyebutan *Jifar Folfolun* dalam tradisi lisan menunjukkan bahwa bagi masyarakat lokal, insiden tersebut adalah aksi penegakan hukum adat yang sakral demi memulihkan martabat komunitas yang dilecehkan oleh keserakahan ekonomi dan moral VOC. Gordon et al. (2019) mencatat bagaimana tradisi lisan ini berfungsi sebagai arsip tandingan yang menjaga memori kolektif lokal tetap hidup, memelihara solidaritas sosial antar-marga di Aru, sekaligus mengukuhkan identitas politik mereka yang menolak tunduk pada hegemoni hukum Barat yang dipaksakan.

Bila dianalisis lebih luas, dikotomi narasi ini mencerminkan adanya konflik epistemologis yang mendalam, di mana terjadi benturan ruang hidup antara rasionalitas hukum tertulis Eropa dan kosmologi hukum adat lokal. Kolonialisme beroperasi dengan asumsi superioritas rasionalitas Eropa, di mana arsip tertulis kolonial dianggap sebagai satu-satunya kebenaran objektif, sementara tradisi lisan pribumi dipinggirkan sebagai dongeng atau mitos yang tidak valid. Konflik epistemologis ini menyingkap bagaimana VOC dan pemerintah kolonial menggunakan sains, hukum, dan pencatatan arsip sebagai instrumen penaklukan untuk mendefinisikan siapa yang beradab dan siapa yang biadab. Akibatnya, seperti yang ditekankan dalam studi Widjojo (2018), agensi politik tokoh lokal seperti Pangeran Nuku yang memiliki kapasitas diplomasi internasional mutakhir sering

kali direduksi dalam teks kolonial hanya sebagai pengacau keamanan atau pemberontak demi mempertahankan status quo narasi superioritas Eropa.

Secara politis, perbedaan ini menegaskan bahwa penulisan sejarah (historiografi) adalah medan pertempuran kekuasaan dan relasi kekuasaan politik yang nyata. Penguasa kolonial mengontrol narasi untuk memutus legitimasi politik para pemimpin lokal dan menjustifikasi perampasan ruang ekonomi serta monopoli cengkik dan pala di Maluku. Ketika perlawanan Nuku berhasil mengintegrasikan kekuatan lintas budaya dari Maluku hingga Papua, struktur kolonial terguncang karena aliansi tersebut meruntuhkan politik pecah belah (*divide et impera*) model kolonial. Oleh karena itu, mengintegrasikan tradisi lisan dan arsip lokal ke dalam historiografi modern bukan sekadar upaya romantisisme masa lalu, melainkan sebuah tindakan dekolonisasi pengetahuan. Langkah ini mengembalikan kedaulatan sejarah kepada masyarakat Maluku, sekaligus membongkar bias kolonial yang berabad-abad telah mengubur kompleksitas strategi, ideologi, dan heroisme sejati masyarakat lokal. Untuk mempermudah pemahaman terhadap analisis di atas, pada Tabel 2 disajikan rangkuman perbedaan konflik epistemologis dan politik kekuasaan antara pihak kolonial dan masyarakat lokal.

Dalam konteks yang berbeda namun relevan, studi Christomy & Suharjo (2019) tentang tiga naskah perjanjian Ternate-Belanda abad ke-19 menunjukkan bahwa bahkan di dalam dokumen kolonial sekalipun, terdapat ruang ambiguitas yang dapat dibongkar melalui analisis metafora dan ekspresi puitis. Mereka menemukan bahwa hubungan antara Belanda, Kesultanan Ternate, dan wilayah taklukan seperti Loloda tidak dapat dibaca secara harfiah sebagai hegemoni sederhana. Sebaliknya, bahasa perjanjian menyembunyikan negosiasi, resistensi diam-diam, dan klaim-klaim kedaulatan yang saling tumpang tindih (Christomy & Suharjo, 2019). Pendekatan poetik yang ditawarkan, meskipun belum secara eksplisit menggunakan kerangka dekolonial, membuka jalan bagi pembacaan melawan arus yang tidak hanya mengandalkan tradisi lisan sebagai sumber eksternal, tetapi juga menggali subteks perlawanan di dalam arsip kolonial itu sendiri. Narasi-narasi alternatif ini tidak hanya berasal dari tradisi lisan tetapi juga dari sumber-sumber sastra dan artistik. Septiansi et al. (2025) menganalisis puisi "Amsterdam-Batavia" karya Zeffry J. Alkatiri sebagai sumber sejarah alternatif

yang merepresentasikan kekerasan kolonial dan penderitaan pribumi dengan cara yang tidak mungkin tertangkap oleh arsip-arsip resmi. Demikian pula, studi Sudibyo & Taufiqurrohmah (2025) tentang tiga fiksi Indonesia yang

merefleksikan trauma kolonial menunjukkan bagaimana sastra dapat berfungsi sebagai memori kolektif yang melestarikan dan mentransmisikan pengalaman kolonial lintas generasi.

Tabel 2. Perbedaan konflik epistemologis dan politik kekuasaan antara pihak kolonial dan masyarakat lokal

Dimensi Analisis	Sudut Pandang Kolonial (Belanda/VOC)	Sudut Pandang Masyarakat Lokal (Maluku/Aru/Tidore)
Penyebutan Insiden	Pembunuhan <i>Posthouder</i> Scheerder; Pemberontakan Pangeran Nuku.	<i>Jifar Folfolun</i> (Perang Payudara); Gerakan Pembebasan/Aliansi Lintas Budaya Nuku.
Konflik Epistemologis	Kebenaran mutlak bertumpu pada arsip tertulis; menganggap hukum adat lokal sebagai anarki dan "tidak beradab".	Kebenaran dirawat melalui tradisi lisan dan hukum adat (<i>sasi/adat</i>); menolak rasionalitas Barat yang eksploitatif.
Karakterisasi Gerakan	Kriminalitas, gangguan keamanan, konflik internal antar-kesultanan yang terfragmentasi.	Perjuangan multidimensi (ekonomi, diplomatik, ideologis berbasis Islam) dan penegakan harga diri adat.
Politik Kekuasaan	Legitimasi monopoli ekonomi, pasifikasi militer, dan pengukuhan dominasi politik Eropa.	Mempertahankan kedaulatan wilayah, hak ekonomi atas rempah, dan pemulihan tatanan kosmis-sosial yang dirusak VOC.
Implikasi Sosial-Politik	Penghancuran struktur kepemimpinan lokal dan marginalisasi identitas pribumi dalam sejarah.	Perawatan memori kolektif perlawanan, penguatan solidaritas antar-marga, dan dekolonisasi sejarah Maluku.

Sumber: Data Diolah.

Namun, penting untuk dicatat bahwa munculnya narasi alternatif ini tidak berarti bahwa historiografi Indonesia secara keseluruhan telah berubah secara fundamental. Beberapa penelitian mengkritik dominasi narasi kepahlawanan yang militeristik dan berpusat pada elite dalam wacana resmi Indonesia, yang cenderung meminggirkan bentuk-bentuk perlawanan akar rumput dan non-militer (O'shea, 2023). O'Shea, dalam analisisnya tentang politik pengakuan di Indonesia pasca-Soeharto, menunjukkan bahwa negara masih memainkan peran sentral dalam menentukan siapa yang diakui sebagai "pahlawan nasional" dan dengan kerangka naratif apa, sering kali mengorbankan pahlawan-pahlawan lokal yang narasinya tidak sesuai dengan agenda nasionalis. Dimensi penting lain dari dekolonisasi arsip adalah kritik institusional terhadap lembaga-lembaga arsip dan museum, baik yang didirikan pada masa kolonial maupun pascakolonial. Sebanyak 15 studi dalam korpus yang dianalisis membahas secara kritis peran institusi-institusi ini dalam mempertahankan, atau dalam beberapa kasus menantang warisan kolonial (Elfathir et al., 2024; Arainikasih, 2024).

Analisis Stoler tentang arsip kolonial sebagai seni pemerintahan memberikan kerangka teoretis yang berpengaruh untuk memahami bagaimana arsip-arsip VOC dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda bukan hanya merekam realitas, tetapi secara aktif mendisiplinkan

populasi terjajah (Stoler, 2006). Analisis ini berakar kuat dari tradisi teori pascakolonial yang secara radikal menggugat netralitas dokumentasi resmi melalui empat *grand theory* utama seperti kritik oposisi biner Barat-Timur dalam *Orientalisme* Said (1978), pelacakan suara kaum tertindas lewat *Teori Subaltern* Spivak & Guha (1988), pembongkaran ruang tiruan identitas dalam teori *Hibriditas* Bhabha (1994), serta kontrol melalui konsensus budaya dalam *Teori Hegemoni* Gramsci (1971). Melalui sintesis teoretis ini, Stoler (2006) memperlihatkan bahwa dokumen administratif sehari-hari sebenarnya adalah perwujudan wacana kekuasaan yang dirancang untuk membuat populasi terjajah menjadi terbaca (*legible*) demi mempermudah pengawasan, klasifikasi, dan intervensi birokratis.

Dalam praktiknya, teknologi kekuasaan ini bekerja dengan mereifikasi kategori identitas lokal seperti adat, di mana tradisi masyarakat pribumi yang semula dinamis dan cair dibekukan menjadi kodifikasi hukum yang kaku demi kepentingan kendali administrasi kolonial. Proses dokumentasi yang mekanis ini telah mengakibatkan distorsi sejarah yang massif, suara, agensi, dan resistensi aktif kaum terjajah sengaja diredam, disaring, atau bahkan dihilangkan dari lembaran resmi agar tidak mengganggu stabilitas narasi kolonial (Stoler, 2006). Oleh karena itu, di bawah bayang-bayang silsilah pascakolonial, membaca arsip VOC dan Hindia Belanda saat ini menuntut sebuah metode

kritis melawan arus untuk membongkar bias kekuasaan dan menemukan kembali rekam jejak agensi pribumi yang tersembunyi di balik teks kolonial.

Secara komparatif, Gibson (2008) menawarkan perspektif historis yang melengkapi analisis Stoler dengan menunjukkan bahwa otoritas birokratis colonial yang ditopang oleh akses tertutup terhadap arsip dan dokumen merupakan salah satu dari tiga bentuk institusi politik yang secara berturut-turut hadir di Asia Tenggara, bersama dengan otoritas stranger-king pra-Islam dan otoritas karismatik shaikh Islam pasca-1605. Menurut Gibson, ketiga institusi ini memiliki kesamaan fungsional: masing-masing berusaha untuk menjauhkan (*estrangle*) otoritas politik dari konflik dan faksionalisme sehari-hari yang melibatkan rakyat biasa (Gibson, 2008). Kritik kelembagaan terhadap lembaga arsip di Indonesia sendiri dilakukan oleh Elfathir dan koleganya, yang meneliti bagaimana *landsarchivaris* (arsiparis tanah) kolonial Belanda secara aktif digunakan untuk membendung organisasi-organisasi kebangkitan nasional pada awal abad ke-20 (Elfathir, 2024). Dengan mengontrol akses terhadap dokumen-dokumen dan mengintensifkan pengawasan terhadap tokoh-tokoh pergerakan, lembaga arsip kolonial berfungsi sebagai instrumen intelijen dan represi, bukan sekadar repositori netral.

Bentuk kontrol yang lebih halus namun tidak kalah penting terlihat dalam naskah Surat Perjanjian Sultan Ternate No. 42, yang menurut Limbong (2021: 354) memuat hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas Belanda sebagai bagian dari proyek unifikasi hukum kolonial di wilayah Ternate. Naskah ini, yang kini tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, secara tekstual merekam bagaimana hukum kolonial dipaksakan untuk menggantikan atau mensubordinasi hukum adat setempat—sebuah praktik kearsipan yang tidak hanya mendokumentasikan tetapi juga melakukan kekuasaan kolonial melalui medium tulisan (Limbong, 2021: 360).

Warisan kolonial ini, menurut literatur, tidak berakhir begitu saja dengan kemerdekaan Indonesia. Lembaga-lembaga arsip dan museum pascakolonial terus bergulat dengan epistemologi kolonial yang mengakar, yang tercermin dalam praktik deskripsi, kategorisasi, dan kurasi (Arainikasih, 2024). Studi tentang museum-museum provinsi di Indonesia, misalnya, mengungkapkan bagaimana narasi kolonial dalam cara pandang Eurosentris masih mengonstruksikan masyarakat pribumi sebagai

entitas yang pasif, eksotis, atau subordinat yang tetap bertahan dalam tata pameran, pelabelan, dan interpretasi, meskipun ada upaya-upaya dekolonisasi.

Ketika museum provinsi berusaha membongkar bias tersebut, mereka sering kali terjebak dalam pembentukan narasi nasionalis, sebuah diskursus yang berpusat pada penyeragaman identitas tunggal demi integrasi nasional dan pelestarian sejarah perjuangan kolektif yang berporos di Jawa (*Jawasentris*). Akibat dominasi kedua diskursus besar ini, perspektif lokal yang mencakup memori kolektif, pengetahuan tradisional, sistem nilai, serta pengalaman sejarah otentik dari komunitas di luar pusat kekuasaan ini, sering kali terpinggirkan. Studi yang menganalisis fenomena "melihat ke belakang dari pinggiran" menegaskan bahwa dalam proses kurasinya, museum-museum provinsi pada akhirnya cenderung mereproduksi narasi nasionalis yang hegemonik tersebut, sehingga mengorbankan narasi sejarah lokal yang bersifat alternatif dan partikular. Namun, ada juga tanda-tanda perubahan positif. Inisiatif-inisiatif untuk mendekolonisasi deskripsi arsip melalui teknologi data terkait dan keterlibatan partisipatif mulai dikembangkan. Douglas dan koleganya mengusulkan penggunaan data terkait (*linked data*) untuk mengakomodasi asal-usul arsip yang kompleks dan perspektif pribumi yang selama ini terpinggirkan oleh skema deskripsi arsip tradisional (Douglas et al., 2018). Sementara itu, Haberstock mengadvokasi "deskripsi partisipatif" sebagai metodologi untuk melibatkan komunitas adat dalam proses deskripsi arsip, sehingga memungkinkan representasi yang lebih akurat dan hormat terhadap sistem pengetahuan local (Haberstock, 2020).

Tema sentral lain yang muncul dari literatur adalah hubungan antara dekolonisasi arsip dan politik memori serta identitas di Indonesia kontemporer. Sebanyak 15 studi secara eksplisit membahas bagaimana kontestasi atas arsip dan narasi sejarah mencerminkan perjuangan yang lebih luas atas pengakuan, representasi, dan keadilan di masyarakat pascakolonial (O'shea, 2023; Utami et al., 2024). Salah satu isu yang paling kontemporer adalah repatriasi arsip dan benda-benda budaya yang dibawa ke Belanda selama periode kolonial. Sejak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949, terjadi negosiasi yang berlarut-larut tentang pengembalian arsip-arsip yang disita atau dipindahkan (Karabinos, 2013; 2015). Dalam serangkaian studinya tentang "arsip yang mengungsi" (*displaced archives*), menunjukkan

bahwa masalah ini tidak hanya teknis tetapi juga sangat politis, menyangkut klaim atas kedaulatan pengetahuan dan legitimasi negara pascakolonial (Karabinos, 2015; van Beurden, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, repatriasi arsip dan benda-benda budaya telah dibingkai ulang sebagai praktik dekolonial dan diplomasi warisan. Abdillah & Nuraeni (2025) menganalisis diplomasi warisan antara Indonesia dan Belanda dalam konteks repatriasi sebagai bentuk keadilan restoratif dan upaya untuk mengatasi ketidakadilan historis. Sementara itu, Smith dan koleganya mengkaji undang-undang perlindungan warisan budaya Indonesia dan menyoroti tantangan-tantangan dalam repatriasi, termasuk ketegangan antara kepentingan negara dan tuntutan masyarakat adat akan kepemilikan dan kontrol atas warisan budaya mereka (Smith et al., 2022). Politik memori juga termanifestasi dalam perdebatan tentang pahlawan nasional dan kritik terhadap narasi-narasi yang berpusat pada orang-orang besar (*great men*) dalam sejarah Indonesia. Kurniawan et al., (2019) mengkritik dominasi historiografi Indonesia yang berfokus pada figur-figur elite dan militer, yang mengakibatkan terpinggirkannya pahlawan-pahlawan lokal dan bentuk-bentuk perlawanan kolektif. Perlu adanya politik memori alternatif yang lebih inklusif dan menghormati keragaman pengalaman sejarah di berbagai daerah, termasuk Maluku. Meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam praktik dekolonisasi arsip, literatur juga mengidentifikasi berbagai tantangan metodologis yang masih perlu diatasi. Pertama, masalah verifikasi dan kontekstualisasi sejarah lisan tetap menjadi isu yang kontroversial. Beberapa sejarawan kritis terhadap penggunaan tradisi lisan karena kekhawatiran tentang akurasi faktual dan unsur-unsur fiksi yang mungkin terkandung di dalamnya. Namun, para pendukung pendekatan dekolonial berargumen bahwa standar objektivitas yang diterapkan pada arsip kolonial sendiri bermasalah, karena arsip-arsip tersebut juga sarat dengan bias, kepentingan, dan distorsi sistematis (Van Donkersgoed, 2023).

Kedua, tantangan bahasa dan terjemahan sering kali menjadi penghambat dalam upaya integrasi sumber. Banyak tradisi lisan dan manuskrip lokal yang ditulis atau disampaikan dalam bahasa-bahasa daerah atau dialek-dialek yang tidak dikuasai oleh para peneliti yang terbiasa dengan bahasa Belanda atau Inggris (van Engelenhoven, 2021). Selain itu, proses terjemahan selalu melibatkan keputusan interpretatif yang dapat mengubah makna, sehingga diperlukan kehati-hatian dan kolaborasi

dengan penutur asli dan anggota komunitas (Pardoe & Arps, 2023). Ketiga, tantangan institusional dan sumber daya tidak boleh diabaikan. Lembaga-lembaga arsip di Indonesia sering kali kekurangan dana, staf terlatih, dan infrastruktur teknologi untuk mendukung inisiatif dekolonisasi berskala besar (Supratman, 2021). Sementara itu, akses terhadap arsip-arsip kolonial yang tersimpan di Belanda juga sering terhambat oleh birokrasi, biaya, dan kebijakan akses yang restriktif (Karabinos, 2013).

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan multi-pronged yang tidak hanya bersifat simultan, tetapi juga strategis dan saling terkait secara organik. Keberhasilan proses dekolonisasi ini tidak dapat dicapai jika strategi-strategi tersebut berjalan sepihak, melainkan bergantung pada sinergi penuh di antara ketiganya. Langkah awal dengan membangun kapasitas sumber daya manusia melalui investasi intensif dalam pelatihan arsiparis dan sejarawan. Para aspirasi dan sejarawan perlu dibekali dengan metodologi dekolonial, seperti etnografi, analisis wacana kritis, dan penguasaan teknologi digital (Haberstock, 2020). Namun, kompetensi teknis ini hanya akan berdampak optimal jika disalurkan melalui ruang kolaborasi yang tepat. Di sinilah strategi kedua menjadi jembatan operasionalnya, yaitu melalui penguatan kerja sama lintas disiplin dan lintas negara yang lebih erat antara lembaga arsip di Indonesia dan Belanda, serta keterlibatan aktif perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil (Abdillah & Nuraeni, 2025). Transformasi kapasitas keilmuan dan jejaring kolaboratif tersebut membutuhkan legitimasi struktural agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kedua strategi di atas harus didukung oleh strategi ketiga, yakni advokasi kebijakan yang agresif guna mengamankan pendanaan berkelanjutan dan dukungan politik yang kuat. Komitmen politik inilah yang nantinya membuka jalan bagi inisiatif dekolonisasi arsip yang lebih besar, termasuk proses repatriasi dan pengelolaan bersama atas arsip-arsip kolonial tersebut (Smith et al., 2022). Keterkaitan sistemik inilah yang menjadikan dekolonisasi arsip sebuah gerakan yang utuh dan berkesinambungan.

Proses dekolonisasi arsip di Kepulauan Maluku berkontribusi secara signifikan dalam menghadirkan pemahaman sejarah Indonesia yang lebih kaya, bernuansa, dan berimbang. Integrasi antara dokumen kolonial, sejarah lisan lokal, dan sistem pengetahuan adat terbukti menjadi instrumen krusial untuk membongkar bias Eurosentris yang selama ini mendominasi

historiografi arus utama. Melalui pendekatan interdisipliner ini, rekonstruksi sejarah tidak lagi terpaku pada sudut pandang tunggal penjajah, melainkan mampu membuka ruang bagi suara-suara pribumi yang selama ini terpinggirkan di dalam lembaran-lembaran arsip konvensional. Studi mendalam mengenai dinamika di Kepulauan Banda, gerakan perlawanan Pangeran Nuku, serta berbagai insiden lokal di Kepulauan Aru menunjukkan bahwa penghidupan kembali narasi pribumi berhasil mengungkap dimensi perjuangan yang kerap luput dari catatan formal kolonial. Bukti baru ini dengan gamblang memperlihatkan kompleksitas strategi lokal yang mencakup aspek ekonomi, jaringan diplomasi antar-pulau, hingga kekuatan resiliensi budaya. Keberadaan perspektif lokal ini tidak hanya memperkaya khazanah dan detail sejarah, tetapi juga mengakui atas agensi masyarakat Maluku sebagai aktor aktif yang berdaulat dalam menentukan arah sejarahnya sendiri. bukan sekadar objek pasif dari kebijakan kolonialisme.

Kedua, dekolonisasi arsip memerlukan inovasi metodologis yang melampaui sekadar menambahkan sumber-sumber lokal ke dalam kerangka kolonial yang sudah ada. Pendekatan-pendekatan seperti pembacaan melawan arus, analisis wacana kritis, deskripsi partisipatif, dan penggunaan teknologi data terkait menawarkan jalan untuk secara fundamental mengubah cara arsip dipahami, dideskripsikan, dan ditafsirkan. Proyek-proyek multimedia dan kolaboratif yang melibatkan komunitas lokal dalam produksi pengetahuan sejarah juga menunjukkan potensi besar untuk mendemokratisasi akses dan representasi.

Ketiga, kritik institusional mengungkapkan bahwa lembaga arsip dan museum, baik yang didirikan pada masa kolonial maupun pascakolonial, bukanlah entitas netral melainkan instrumen kekuasaan yang telah membentuk dan terus membentuk historiografi dan memori kolektif dengan cara-cara yang sering kali melanggengkan ketidakadilan epistemik. Warisan kolonial dalam praktik kearsipan tidak berakhir dengan kemerdekaan Indonesia; sebaliknya, ia bertahan dalam bentuk-bentuk baru yang terkadang lebih halus namun tetap bermasalah. Keempat, politik memori dan identitas yang terkait dengan dekolonisasi arsip memiliki implikasi praktis yang signifikan, termasuk dalam ranah diplomasi warisan, repatriasi, dan reformasi kurikulum pendidikan sejarah. Upaya-upaya repatriasi arsip dan benda-benda budaya antara Indonesia dan Belanda tidak hanya menyangkut pengembalian properti fisik tetapi

juga pengakuan atas ketidakadilan historis dan langkah menuju keadilan restoratif.

IV. PENUTUP

Hasil penelitian ini mengidentifikasi berbagai keterbatasan sistemik yang menghambat realisasi dekolonisasi arsip secara praktis maupun teoritis melalui tiga lapis tantangan yang saling berkelindan. Pada lapis pertama, muncul hambatan berbasis sumber yang dipicu oleh masih masifnya dominasi arsip kolonial, di mana upaya mengimbanginya melalui sejarah lisan kerap membentur peliknya verifikasi metodologis, kesenjangan bahasa, serta terbatasnya akses terhadap dokumen kunci. Hambatan tersebut kemudian diperparah oleh kelembaman institusional di tingkat kelembagaan, di mana keterbatasan anggaran dan keahlian khusus membuat institusi pengarsipan cenderung mandek pada metode konvensional dan gagal bertransformasi menjadi ruang inklusif yang mengadopsi epistemologi non-Barat. Di atas tatanan teknis dan lembaga tersebut, agenda nasionalis serta politik memori negara bertindak sebagai hambatan politik dan ideologis yang menyaring arsip demi mempertahankan mitos pembentukan identitas nasional, sehingga narasi alternatif yang tidak sejalan dengan kepentingan penguasa sengaja dipinggirkan. Akibat akumulasi hambatan yang terstruktur ini, dekolonisasi arsip pada akhirnya baru menyentuh tatanan diskursus akademis secara teoritis, namun belum memanasifestasikan keadilan epistemis yang nyata dalam praktik tata kelola arsip sehari-hari.

Untuk penelitian masa depan, agenda dekolonisasi arsip di Indonesia Timur harus diarahkan pada pendekatan yang lebih integratif, kontekstual, dan inklusif. Hal ini dimulai dari penguatan studi empiris pengarsipan partisipatif di Maluku guna membangun model kolaborasi yang menempatkan komunitas lokal sebagai mitra setara, yang kemudian diakselerasi melalui pemanfaatan teknologi digital seperti linked data, kecerdasan buatan, dan platform akses terbuka. Kendati teknologi tersebut membuka peluang besar dalam memangkas sekat geografis wilayah kepulauan dan kendala bahasa, implementasinya wajib memitigasi tantangan etika, keamanan data, dan pelibatan komunitas secara aktif agar tidak memicu marjinalisasi baru. Lebih jauh, keberhasilan dekolonisasi ini sangat bergantung pada analisis komparatif yang peka terhadap variabel lokal seperti variasi kultur, bahasa, dan kondisi politik setempat, di mana penanganan kasus berbasis sejarah kesultanan di Maluku

Utara tentu menuntut pendekatan yang berbeda dengan kompleksitas sosiopolitik di Papua maupun karakteristik kultural di Nusa Tenggara Timur. Pada akhirnya, seluruh upaya ini bermuara pada urgensi penelitian restitusi dan repatriasi fisik maupun digital atas arsip-arsip kolonial dari Belanda (Chauvel, 2009; van Beurden, 2022; Abdillah & Nuraeni, 2025), yang bukan sekadar urusan birokrasi dokumen, melainkan sebuah ikhtiar untuk memulihkan kedaulatan pengetahuan, menegakkan hak atas memori kolektif, dan merajut kembali identitas kultural masyarakat adat di belahan timur Nusantara.

Berbagai literatur yang dikaji dalam artikel ini menggarisbawahi potensi transformatif dekolonisasi arsip untuk merekonstruksi sejarah Maluku yang lebih inklusif, adil, dan majemuk. Wilayah kepulauan Maluku sebagai episentrum perdagangan rempah global sekaligus saksi Sejarah tentang kekerasan colonial, proses ini menemukan urgensi tertingginya. Urgensi tersebut melampaui batasan akademis karena menjadi instrumen utama bagi keadilan restoratif dan rekonsiliasi komunitas yang terdampak. Melalui pemulihan suara-suara yang terpinggirkan dan pembongkaran struktur kekuasaan kolonial dalam arsip, dekolonisasi ini membuka ruang bagi historiografi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Artinya, sejarah tidak lagi sekadar mencatat kronologi penguasa, melainkan aktif mengakui trauma serta pengalaman kolektif masyarakat lokal melalui wacana alternatif yang selama ini dibungkam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. Z., & Nuraeni, N. 2025. Heritage Diplomacy Indonesia-Belanda dalam Repatriasi Warisan Budaya menurut Perspektif Poskolonialisme. *Padjajaran Journal of International Relations*, 7(2), 154–175.
<https://doi.org/10.24198/padjir.v7i2.62609>
- Andaya, L. Y. 1993. *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. University of Hawaii Press.
- Arainikasih, A. A. 2024. A story of entanglement between Indonesian national heroes, museums, and decolonization. *ICOFOM Study Series*, 52(1), 124–137.
<https://doi.org/10.4000/11zly>
- Balk, G. L., van Dijk, F., & Kortlang, D. J. 2007. *The archives of the Dutch East India Company (VOC) and the local institutions in Batavia (Jakarta). The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta)* (pp. 1–571). Brill.
<https://doi.org/10.1163/ej.9789004163652.1-556>
- Bastian, J.A. 2006. Reading Colonial Records Through an Archival Lens: The Provenance of Place, Space and Creation. *Archival Science*, 6, 267-284.
- Basu, P. 2024. The Colonial Archive as Decolonial Cultural Resource. *African Arts*, 57(3), 8–25.
https://doi.org/10.1162/afar_a_00770
- Beena, S. 2026. Voices from the Margins: A Decolonial Analysis of Climate Change Narratives in People's Archive of Rural India (PARI). *Environmental Communication*, 20(1), 154–175.
<https://doi.org/10.1080/17524032.2025.2596621>
- Bhabha, H. K. 1994. *The Location of Culture*. Great Britain: Taylor & Francis.
- Caswell, M., Punzalan, R., & Sangwand, T.-K. 2017. Critical Archival Studies: An Introduction. *Journal of Critical Library and Information Studies*, 1(2).
<https://doi.org/10.24242/jclis.v1i2.50>
- Chauvel, R. 2009. From the ramparts of Fort Victoria: Knowing Indonesia through a distant mirror. *RIMA: Review of Indonesian & Malaysian Affairs*, 43(1), 165.
- Christomy, T., & A. Suharjo, R. 2019. Loloda in Three Ternate-Dutch Treaty Manuscript in 19th Century. *International Review of Humanities Studies*.
<https://doi.org/10.7454/irhs.v0i0.202>
- Comber, R. 2025. Designing with Decolonial Intent: Towards a Decolonial Archive in Resistance to Epistemicide. In *DIS 2025 - Proceedings of the 2025 ACM Designing Interactive Systems Conference* (hlm. 884–898). Association for Computing Machinery.
<https://doi.org/10.1145/3715336.3735739>
- Crisci, G. 2024. Making and unmaking the archive: Between contemporary artistic practices and decolonial options in documenta fifteen. *Magazen*, 5(2), 241–256.
<https://doi.org/10.30687/mag/2724-3923/2024/02/004>
- Cyzewski, J. 2024. Media Archives and Postcolonial/Decolonial Voice. Dalam *Bloomsbury Handbook of Modernist Archives* (hlm. 297–310). Bloomsbury Academic.
<https://doi.org/10.5040/9781350450578.ch-023>

- Dorvillé, E. M. 2025. "Unfortunate Minervina": notes of documentary ethnography with a criminological, feminist and decolonial perspective in the historical archives of the Court of Justice of the State of Alagoas. *Revista Eletrônica Direito e Sociedade*, 13(2). <https://doi.org/10.18316/redes.v13i2.12659>
- Douglas, J., Bak, G., McLellan, E., van Hooland, S., & Frogner, R. 2018. Decolonizing archival description: Can linked data help? In *Proceedings of the Association for Information Science and Technology* (Vol. 55, pp. 669–672). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1002/pr2.2018.14505501077>
- Elfathir, R., Defit Zain, R., Foryani Harefa, A. S., Pratama PK, R., & Hidayatullah, T. M. 2024. Penggunaan Landsarchivaris oleh Kolonial Belanda dalam Membendung Organisasi Kebangkitan Bangsa. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 4(2), 307–312. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v4i2.614>
- Eom, S. 2024. Fugitive Archives: Architecture, Police Photography, and Decolonial Futures. *Critical Asian Studies*, 56(4), 576–601. <https://doi.org/10.1080/14672715.2024.2381245>
- Farid, M. 2024. Dari Memoria Passionis Menuju Truestoriografi: Peristiwa Genosida Banda Tahun 1621 Sebagai Refleksi. *BANDA HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Studi Budaya*, 2(1), 47–58. <https://doi.org/10.62176/bastoria.v2i1.382>
- Finden, A. 2026. Unsettling Feelings: Colonial Archives, Decolonial Possibilities. *Global Studies Quarterly*, 6(2). <https://doi.org/10.1093/isagsq/ksag051>
- Finden, A. E. 2024. Counter-mapping the archive: a decolonial feminist research method. *Cambridge Review of International Affairs*, 37(4), 461–482. <https://doi.org/10.1080/09557571.2023.2285759>
- Genovese, T. R. 2016. Decolonizing archival methodology: Combating hegemony and moving towards a collaborative archival environment. *AlterNative*, 12(1), 32–42. <https://doi.org/10.20507/AlterNative.2016.12.1.3>
- Gibson, T. 2008. From Stranger-King to Stranger-Shaikh. *Indonesia and the Malay World*, 36(105), 309–321. <https://doi.org/10.1080/13639810802268072>
- Gordon, A. R., Djonler, S. A., & Hägerdal, H. 2019. The killing of Posthouder Scheerder and Jifar Folfolun (The War of the Breasts): Malukan and Dutch narratives of an incident in the VOC's waning days. *Journal of Southeast Asian Studies*, 50(3), 324–346. <https://doi.org/10.1017/S0022463419000420>
- Gramsci, A. 1971. *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. Great Britain: International Publishers.
- Guha, R., & Spivak, G. C. (Eds.). 1988. *Selected Subaltern Studies*. Great Britain: Oxford University Press.
- Haberstock, L. 2020. Participatory description: decolonizing descriptive methodologies in archives. *Archival Science*, 20 (2), 125–138. <https://doi.org/10.1007/s10502-019-09328-6>
- Heryanto, A. 2018. Decolonising Indonesia, Past and Present. *Asian Studies Review*, 42(4), 607–625. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1516733>
- Hochstrasser, J. B. 2015. The Bones in Banda: Vision, Art, and Memory in Maluku. In *Midwestern Arcadia*. Carleton College. <https://doi.org/10.18277/makf.2015.14>
- Ingalls, M. M. 2024. Reconstructing Hymn Canons through International Partnership: The Nigerian Christian Songs Project as Cultural Archive, Pedagogical Tool, and Decolonial Resource. Dalam *Hymns and Constructions of Race: Mobility, Agency, De-Coloniality* (hlm. 234–249). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003356677-14>
- Karabinos, M. 2015. The Djogdja Documenten: The Dutch-Indonesian Relationship Following Independence through an Archival Lens. *Information & Culture*, 50(3), 372–391. <https://doi.org/10.1353/lac.2015.0016>
- Karabinos, M. J. 2013. Displaced archives, displaced history: Recovering the seized archives of Indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 169(2–3), 279–294. <https://doi.org/10.1163/22134379-12340027>
- Kurniawan, G. F., Warty, W., & Sutimin, L. A. 2019. Dominasi Orang-Orang Besar Dalam Sejarah Indonesia: Kritik Politik Historiografi dan Politik Ingatan. *Jurnal Sejarah Citra*

- Lekha, 4(1), 36.
<https://doi.org/10.14710/jscl.v4i1.21576>
- Limbong, P. F. 2021. Colonial law as a form of unification of law in the manuscript of Surat perjanjian sultan ternate. In *Dissecting History and Problematizing the Past in Indonesia* (pp. 353–364). Nova Science Publishers, Inc.
- Long, K. 2025. Reimagining Archives in the Age of Automation: A Decolonial and Relational Approach. *Technical Communication Quarterly*, 34(3), 336–352.
<https://doi.org/10.1080/10572252.2025.2490506>
- McGregor, K., & Dragojlovic, A. 2024. Songs from another land: Decolonizing memories of colonialism and the nutmeg trade. *Memory Studies*, 17(3), 599–612.
<https://doi.org/10.1177/17506980241242388>
- Mignolo, W. D. 2007. Delinking: The rhetoric of modernity, the logic of coloniality and the grammar of de-coloniality. *Cultural Studies*, 21(2–3), 449–514.
<https://doi.org/10.1080/09502380601162647>
- Mulyanto, H. 2023. Penggunaan Naskah Kuno dan Arsip dalam Historiografi Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis. *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 14(1), 45–63. Retrieved from <https://ejournal.perpusnas.go.id/jm/article/view/3301>
- Niemeijer, H. E. 2023. Conquest, Colonialism, and Religious Conflict in the Moluccas in the Early Seventeenth Century. In *Early Modern Toleration: New Approaches* (pp. 216–236). Taylor and Francis.
<https://doi.org/10.4324/9781003030522-15>
- O'shea, P. 2023. Politics of Recognition: Heroes, Victims and the Contest over History in Post-Suharto Indonesia. In *Trajectories of Memory: Excavating the Past in Indonesia* (pp. 171–187). CRC Press.
https://doi.org/10.1007/978-981-99-1995-6_10
- Pardoe, L., & Arps, A. 2023. Translation, Memory, and Ongoing Coloniality: Reading Gentayangan for a More Worldly Dutch Studies. *Dutch Crossing*, 47(1), 49–62.
<https://doi.org/10.1080/03096564.2022.2144598>
- Post, P. 2024. Revolution and Resistance: An Exploration of the Looping Effect in the Moluccas in 1817. *Itinerario*, 48(2), 136–151.
<https://doi.org/10.1017/S0165115324000184>
- Quijano, A. 2000. Coloniality Of Power, Eurocentrism, And Latin America. In *Anibal Quijano* (pp. 256–302). Duke University Press.
<https://doi.org/10.2307/jj.12250639.14>
- Rahman, A., Christomy, T., Zuhdi, S., & Putri, L. G. S. 2023. Locating Sikuru, “Hero of Loloda.” Dalam *Trajectories of Memory: Excavating the Past in Indonesia* (pp. 41–59). CRC Press.
https://doi.org/10.1007/978-981-99-1995-6_3
- Reyero, A. 2026. Experimental Practices in the Argentinian Northeast: Imago-Material Assemblages and Other Decolonial Inventions with Archives. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 21(1), 16–37.
<https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae21-1.namd>
- Said, E. W. 1978. *Orientalism*. Great Britain: Knopf Doubleday Publishing Group.
- Sattarzadeh, S. D. (2024). ‘Hunting’ for a Black Feminist Decolonial ‘Archive’ at a Predominantly White University. Dalam *BERA Guide to Decolonising the Curriculum: Equity and Inclusion in Educational Research and Practice* (hlm. 197–210). Emerald Publishing Limited.
<https://doi.org/10.1108/978-1-83549-144-720241018>
- Schon, V. R. 2025. Experiencing digital fashion archives through a decolonial lens. *European Journal of Cultural Management and Policy*, 15.
<https://doi.org/10.3389/ejcmp.2025.14563>
- Septiansi, I., Winarti, M., & Saripudin, D. 2025. Representasi Peristiwa Sejarah Dalam Puisi Amsterdam-Batavia Karya Zeffry J. Alkatiri. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 10(2), 1589–1596.
<https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i2.1836>
- Smith, E., Ristiawan, R., & Sudarmadi, T. 2022. Protection and Repatriation of Cultural Heritage – Country Report: Indonesia. *Santander Art and Culture Law Review*, 8(2), 383–406.
<https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.22.025.17038>
- Smith, L. T. 2021. *Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples. Decolonizing Methodologies:*

- Research and Indigenous Peoples* (pp. 1–345). Bloomsbury Publishing Plc. <https://doi.org/10.2307/2653993>
- Spivak, G. C. 2025. Can the Subaltern Speak? In *Feminist Studies: An Introductory Reader* (pp. 67–77). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003341567-11>
- Staphorst, L. 2024. On the Seeable Limits of Decolonial and Indigenous Scholarship: Conceptualising Ondeursigbaarheid as Critical Analytic Through Reference to the |xam, the Bleek and Lloyd Archive, and Bushman Studies. *Critical Arts*. <https://doi.org/10.1080/02560046.2024.2430473>
- Stoler, A. L. 2006. Colonial archives and the arts of governance: On the content in the form. In *Archives, Documentation, and Institutions of Social Memory: Essays from the Sawyer Seminar* (pp. 267–279). University of Michigan Press. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0570-8_7
- Stoler, A. L. 2010. *Along the archival grain: Epistemic anxieties and colonial common sense. Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense* (pp. 1–316). Princeton University Press. <https://doi.org/10.1016/j.jhg.2012.01.006>
- Sudibyo, Andalus, E. F., & Taufiqurrohman, M. 2025. Echoes of the Past: Collective Memory of Dutch Colonialism in Three Indonesian Fictions (1990-2023). *Theory and Practice in Language Studies*, 15(9), 3072–3081. <https://doi.org/10.17507/tpls.1509.29>
- Supratman, F. R. 2021. Sains Terbuka (Open Science) dan Dekolonisasi Pengetahuan: Studi Kasus Ilmu Sejarah. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 42(2), 211. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v42i2.826>
- Utami, I. W. P., Sapto, A., Leksana, G. T., & Ayundasari, L. 2024. Decolonizing Indonesian History Curriculum, 1946-1964. *Paramita*, 34(1), 110–127. <https://doi.org/10.15294/paramita.v34i1.43482>
- van Beurden, J. 2022. Claims for Colonial Objects and for Colonial Archives. In *Disputed Archival Heritage* (pp. 262–281). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003057765-15>
- Van Donkersgoed, J. 2023. Shifting the historical narrative of the Banda Islands From colonial violence to local resilience. *Wacana*, 24(3), 500–514. <https://doi.org/10.17510/wacana.v24i3.1657>
- van Engelenhoven, G. 2021. From Indigenous Customary Law to Diasporic Cultural Heritage: Reappropriations of Adat Throughout the History of Moluccan Postcolonial Migration. *International Journal for the Semiotics of Law*, 34(3), 695–721. <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09781-y>
- Vishwajeet. 2026. The Compost of History: Olfactory Aesthetics, Patriarchal Ruin, and the Decolonial Archive in Shani Mootoo's *Cereus Blooms at Night*. *Critique: Studies in Contemporary Fiction*. <https://doi.org/10.1080/00111619.2026.2644386>
- Widjojo, M. S. 2018. Cross-cultural alliance-making and local resistance in maluku during the revolt of prince nuku, c. 1780-1810. Brill.
- Yamomo, M. 2025. Rehearsing Decolonial Curatorship of Southeast Asian Sound Archives in Europe. Dalam *Future of the Dutch Colonial Past: Curating Heritage, Art and Activism* (hlm. 110–125). Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.2307/jj.11895526.11>
- Young, S. 2025. Thinking with the Ocean as Decolonial Strategy: Memory, Loss, and the Underwater Archive in Shakespeare's *The Tempest*. Dalam *Water and Cognition in Early Modern English Literature* (hlm. 283–301). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789463724791_ch13



Copyright© 2026. Aji Deni, Agusmawanda, Sosiawaty, Aswir Badjoda

